



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023-2024
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN**

*

**

**

*

JAKARTA 2023



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023-2024
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN
6-10 DESEMBER 2023

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 1 November 2023.

B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sumatera Selatan adalah melakukan fungsi pengawasan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pokok DPR RI.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk:

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta stakeholder di bidang kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, serta pertanian, sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI;
2. Melihat langsung di lapangan manfaat dari realisasi dan pelaksanaan pembangunan bidang tugas Komisi IV DPR RI; serta
3. Menyerap aspirasi daerah dalam rangka meningkatkan program-program Pemerintah terkait bidang kerja Komisi IV DPR RI pada tahun anggaran yang akan datang.

D. SUSUNAN TIM

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Budhy Setiawan (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI) dan diikuti oleh Para Anggota Komisi IV DPR RI.

E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 6-10 Desember 2023.

F. LOKASI KUNJUNGAN KERJA

1. Wisata Alam Bukit Sulap Taman Nasional Kerinci Seblat dalam rangka meninjau Pembangunan di Kawasan Konservasi Bukit Sulap.
2. Kawasan Pertanian Terpadu dalam Upaya Pengembangan Komoditas Cabai di CV Mutiara Bonggol, Lubuklinggau.
3. Broodstock Center Musirawas dalam Upaya Pengembangan Budidaya Ikan di Kabupaten Musi Rawas.

II. GAMBARAN UMUM

Kota Lubuklinggau merupakan salah satu kota setingkat kabupaten yang letaknya paling barat dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Secara astronomi Kota

Lubuklinggau berada antara 102 ° 40' 0" - 103 ° 0' 0" bujur timur dan 3 ° 4' 10" - 3 ° 22' 30" lintang Selatan.

Luas wilayah daerah ini adalah 401,50 Km² atau 40.150 Ha. Secara administratif Kota Lubuklinggau terdiri dari 8 kecamatan dan 72 kelurahan, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas
2. Sebelah Timur: Kecamatan Tugu Mulyo dan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dan Provinsi Bengkulu
4. Sebelah Barat: Provinsi Bengkulu

Kondisi morfologi lahan di wilayah Kota Lubuklinggau secara umum dipengaruhi keberadaan Pegunungan Bukit barisan, Dimana ketinggian lahan berada pada ketinggian 129 meter di atas permukaan laut dengan morfologi lahan bervariasi dengan klasifikasi dataran rendah sampai dengan berbukit/bergunung. Keadaan alamnya terdiri dari hutan potensial, sawah, ladang, kebun karet, dan kebun lainnya.

Kota Lubuklinggau memiliki posisi geostrategis dengan menjadi Kota perlintasan jalur tengah Sumatera yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Bengkulu di sisi Barat, Provinsi Lampung di sisi Selatan dan wilayah lainnya di bagian utara Pulau Sumatera. Dengan bertemunya berbagai arus lalu lintas tersebut. Kota Lubuklinggau menjadi Kota transit atau Kota pertemuan berbagai kepentingan sosial, ekonomi dan budaya. Konsekuensi logis dari berpadunya berbagai kepentingan tersebut, mengakibatkan Kota Lubuklinggau menjadi Kota yang heterogen.

III. HASIL KUNJUNGAN

1. Optimalisasi Pengembangan *Eco-Dusportourism* di Kawasan Wisata Bukit Sulap.

Ekowisata merupakan konsep pengembangan perjalanan wisata alam yang menggabungkan hiburan dari alam baik alami ataupun buatan dan pengembangan konservasi alam serta pemahaman pelestariannya. Ekowisata sangat mengutamakan 3 aspek yaitu aspek ekologis atau keberlangsung hidup, aspek peningkatan manfaat ekonomi, dan aspek persepsi masyarakat

dalam kehidupan sosial lokal. Kegiatan ekowisata selain memberi pengalaman alam dan budaya lokal, dapat pula menimbulkan kesadaran masyarakat tentang pelestarian untuk keberlangsung wisata alam.

Wisata Alam Bukit Sulap terletak dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat pada Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) wilayah V Provinsi Sumatera Selatan yang masuk dalam zona pemanfaatan pariwisata alam. Bukit Sulap merupakan wisata alam yang unik karena akan terlihat dekat ketika memandangnya dan akan terlihat jauh ketika mendatanginya. Selain menjadi destinasi wisata, Bukit Sulap juga dijadikan sebagai sarana pendidikan yang menjadi lokasi praktikum lapangan untuk beberapa sekolah. Wisata Alam Bukit Sulap dikembangkan Balai Taman Nasional Kerinci Seblat dan Pemerintah Kota Lubuklinggau Sebagai Ikon dan mewakili keanekaragaman hayati Kota Lubuklinggau, serta akses dan lokasi yang dekat dengan pusat kota.

Pada Kawasan Wisata Alam Bukit Sulap memiliki keterwakilan ekosistem yang masih alami dengan keanekaragaman hayati yang menjadi daya tarik wisatawan. Bukit Sulap menjadi tempat tumbuh bagi salah satu flora langka yaitu *Amorphophallus sp.* (Bunga bangkai) dan didominasi jenis tumbuhan budidaya, seperti *Durio zibethinus* (Durian), *Aleurites moluccana* (Kemiri), Bukit sulap pula merupakan rumah dari beberapa fauna seperti *Presbytis Melalophos* (Simpai), *Macaca fascicularis* (Monyet Ekor Panjang), serta *Prinia familiaris*.

Objek dan daya tarik wisata alam yang ditawarkan pada Wisata Alam Bukit Sulap yaitu Bukit Sulap dengan ketinggian 700 mdpl dan suguhan pemandangan Kota Lubuklinggau pada puncaknya. Untuk mencapai puncak Bukit Sulap dilakukan dengan cara Trekking atau dengan sarana *Inclinat* atau kereta miring. Pada jalur pendakian Bukit Sulap terdapat pula jalur sepeda gunung dengan latar belakang Air Terjun Sumber Mata Air yang sering digunakan untuk ajang perlombaan baik nasional maupun internasional. Selain pemandangan Kota Lubuklinggau pada puncak Bukit Sulap Terdapat makam tua yang dianggap sebagai makam leluhur sehingga sangat sakral bagi masyarakat, hingga kini makam tersebut sering diziarahi oleh wisatawan. Disekitar makam tersebut tumbuh bambu yang memiliki keunikan, batang bambu tersebut berwarna hijau tetapi rantingnya berwarna kuning dan berduri

terdapat pula bambu yang batangnya berlubang tetapi dahan dan rantingnya buntu.

Selain Inclinator atau kereta miring terdapat pula sarana seperti shelter, toilet, jalan aspal sampai ke depan gerbang lokasi wisata alam Bukit Sulap dan jalan setapak untuk pendakian Bukit Sulap, jembatan pada air terjun. Di sekitar wisata alam bukit sulap terdapat pula beberapa penginapan yang tidak jauh dari pusat kota Lubuklinggau dan wisata alam Bukit Sulap.

Pengembangan wisata di kawasan Bukit Sulap, sebagai salah satu destinasi wisata yang menjanjikan, Bukit Sulap memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata yang lebih baik lagi. Namun, seperti yang kita ketahui, pengembangan wisata di Bukit Sulap masih memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah terbatasnya wahana yang bisa dijadikan sarana atraksi wisata alam. Selain itu, terkendalanya sumber pendanaan juga menjadi hambatan dalam pengadaan sarana wisata alam. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang baik antara pihak pengelola, pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini.

Selain itu, masih terbatasnya promosi wisata Bukit Sulap juga menjadi salah satu tantangan pengembangan wisata Bukit Sulap. Namun, terdapat peluang - peluang promosi melalui media sosial, influencer lokal, serta pelibatan generasi muda dalam berbagai kegiatan wisata di Bukit Sulap, sehingga dapat memberikan pengetahuan dan minat masyarakat luas tentang potensi wisata di Bukit Sulap.

Dalam rangka mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan rencana pengembangan *Eco-dusportourism* yaitu penggabungan antara kegiatan ekowisata, pendidikan, dan olahraga. Hal ini dapat dicapai melalui keterlibatan parapihak dalam mendukung wisata Bukit Sulap, dalam hal ini meliputi pihak Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS), Pemerintah Kota Lubuklinggau, P.T. Linggau Bisa, media massa, serta elemen masyarakat lainnya, dengan kerjasama yang baik antara semua pihak, maka pengembangan wisata Bukit Sulap ke depannya akan memberikan dampak meluas terhadap kelestarian kawasan TNKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, serta terjaganya nilai-nilai sosial.

Dalam kesempatan Kunjungan Kerja Reses kali ini, Komisi IV DPR RI ingin melihat secara langsung dan mendapatkan gambaran mengenai pengembangan wisata di Bukit Sulap :

- a. Bagaimana kerjasama pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pengembangan wisata di Bukit Sulap;
- b. Bagaimana kompetensi SDM, penyiapan tenaga dan sarana prasarana kaitannya pengembangan wisata di Bukit Sulap;
- c. Bagaimana ketersediaan anggaran dalam hal pengembangan wisata di Bukit Sulap; serta
- d. Dukungan yang diperlukan dari Komisi IV DPR RI dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi.

Aspirasi

- a. Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA) PT Linggau Bisa yang sudah dipulihkan yang awalnya sempat masuk list Surat Keputusan Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan, dimana P.T. Linggau Bisa masuk dalam daftar pemegang IUPSWA/PB-PSWA dengan hasil evaluasi kinerja buruk. Dan pada 20 Juli 2023 terbit Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.782/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2023 tentang Pemulihan Kegiatan Pemegang Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam d/h Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) P.T. Linggau Bisa di Zona Pemanfaatan Bukit Sulap TNKS seluas 42,375 hektar di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, maka dengan terbitnya SK tersebut P.T. Linggau Bisa dinyatakan diberikan peluang melakukan kegiatan PB-PSWA sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. Pengelolaan wisata Bukit Sulap memiliki tantangan, salah satunya adalah masih terbatasnya wahana yang bisa dijadikan sarana atraksi wisata alam, keberadaan P.T. Linggau Bisa selaku pemegang PB-PSWA masih terhambat dalam pengadaan sarana wisata alam karena adanya permasalahan atau terkendala sumber pendanaan padahal pada dokumen RKL mereka telah direncanakan adanya beberapa pembangunan sarana

pendukung, dimana sarana tersebut dapat memberikan pemasukan berupa insentif/ profit kepada pihak pengelola (PT. Linggau Bisa) dan Pemerintah (PNBP) dari pengunjung. Selain itu terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada P.T. Linggau Bisa sebagai pihak pengelola juga brakibat tidak maksimalnya pengelolaan PB-PSWA.

- c. Masih terbatasnya promosi wisata Bukit Sulap menjadi salah satu tantangan pengembangan wisata Bukit Sulap, terdapat peluang- peluang promosi melalui media sosial, influencer lokal, serta pelibatan generasi muda dalam berbagai kegiatan wisata di Bukit Sulap, sehingga dapat memberikan pengetahuan dan minat masyarakat luas tentang potensi wisata di Bukit Sulap.
- d. Rencana Pengembangan Wisata Bukit Sulap Bukit Sulap dengan berbagai potensi, permasalahan, dan tantangan yang dimiliki memerlukan rencana pengembangan Eco-dusportourism yaitu penggabungan antara kegiatan ekowisata, pendidikan, dan olahraga. Hal ini dapat dicapai melalui keterlibatan parapihak dalam mendukung wisata Bukit Sulap, dalam hal ini meliputi pihak TNKS, Pemkot Lubuklinggau, P.T. Linggau Bisa, media massa, serta elemen masyarakat lainnya. Pengembangan wisata Bukit Sulap ke depannya, diharapkan dapat memberikan dampak meluas terhadap kelestarian kawasan TNKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, serta terjaganya nilai-nilai sosial yang tetap terjaga.
- e. Perlunya bantuan dan akses modal dari APBN pemerintah pusat dalam rangka pengembangan wisata di Bukit Sulap;
- f. Perlunya Alokasi anggaran dari kementerian lain yang terkait untuk pengembangan wisata di Bukit Sulap;
- g. Perlunya Kemitraan konservasi melalui pengembangan, pelatihan, pendampingan dan promosi hasil produk UMKM masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi TNKS, sehingga dapat mendukung kegiatan ekowisata pada sisi lain dan pada sisi lain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan ekosistem di TNKS tetap dapat terjaga dengan baik;

Tanggapan

- a. Terkait bantuan permodalan dari pemerintah pusat dalam hal ini melalui APBN agak sulit, dikarenakan tambahan modal kepada BUMN saja diambilkan dari sisa anggaran, untuk itu disarankan kepada BUMD mengagagas kerjasama dengan pihak lain misalnya saja dengan BUMN;
- b. Dengan adanya RUU KSDAE diharapkan kolaborasi dan pendanaan konservasi melalui PNBPN dapat didistribusikan kepada pemerintah daerah yang memiliki kawasan konservasi;
- c. Dengan adanya RUU KSDAE ini juga diharapkan semua swasta yang menggunakan kawasan hutan akan dikenakan dana konservasi, dana tersebut kemudian akan diberikan kepada pemerintah daerah yang memiliki kawasan konservasi;
- d. Sharing pembiayaan dan bagi hasil dengan pihak investor dalam hal pengembangan ekowisata di kawasan konservasi;
- e. Bantuan dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui evaluasi izin wisata bukit sulap, selanjutnya program Kelompok Masyarakat Peduli Wisata (POKDARWIS) berupa dana anggaran untuk mendukung pengembangan wisata bukit sulap BUMD PT. Lingga Bisa;
- f. Kemitraan konservasi sangat dimungkinkan, hal ini telah didukung oleh regulasi yang ada melalui turunan dari UU No 5 tahun 1990, baik itu Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masyarakat dapat mengakses sumber daya hutan dalam hal ini hasil hutan non hutan melalui izin akses, selain mendapatkan akses, pemerintah juga memberikan pelatihan-pelatihan untuk dapat mengembangkan hasil hutan non kayu tersebut menjadi lebih bernilai ekonomis;
- g. Pemerintah juga memberikan lahan untuk CSR bagi BUMD, sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi.

2. Kawasan Pertanian Terpadu dalam Upaya Pengembangan Komoditas Cabai di CV Mutiara Bonggol, Lubuklinggau.

Berdasarkan data BPS tahun 2022, produksi komoditas strategis di Provinsi Sumatera Selatan khususnya pengembangan hortikultura adalah cabai besar

25.497,33 ton, cabai rawit 9.460,63 ton dan bawang merah 1.129,89 ton. Adapun di Kota Lubuklinggau data luas tanam, luas panen, dan produksi cabai besar, cabai rawit dan bawang merah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Cabai Besar di Kota Lubuklinggau

Tahun	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
2020	17	22	27,4
2021	24,25	25,40	35,77
2022	21,50	21,25	60,05

Sumber: BPS

Tabel 2. Data Cabai Rawit di Kota Lubuklinggau

Tahun	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
2020	2,75	2,75	0,6
2021	1,75	1,75	1,80
2022	5,25	7,75	8,53

Sumber: BPS

Tabel 3. Data Bawang Merah di Kota Lubuklinggau

Tahun	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	5	4	5

Sumber: BPS

Selain komoditas cabai dan bawang merah, Kota Lubuklinggau juga memiliki potensi pengembangan buah durian. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir produksi durian di Kota Lubuklinggau mengalami peningkatan, sebagaimana tabel 4. Beberapa varietas durian yang ada antara lain varietas lokal, Montong, Musangking dan Bawor.

Tabel 4. Luas Panen dan Produksi Durian di Kota Lubuklinggau

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)
2020	31,95	103,26
2021	32,08	296,65
2022	71,50	539,48

Sumber: BPS

Ket: Luas panen (Ha) berdasarkan jumlah tanaman menghasilkan dibagi populasi 100 pohon dalam 1 Ha

Dalam rangka mendukung potensi pengembangan hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura telah mengalokasikan kegiatan melalui dana Tugas Pembantuan (TP) dan APBN di Kota Lubuklinggau seperti pada Tabel 5.

Tabel 5. Alokasi Kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura di Kota Lubuklinggau

Output	Satuan	2021		2022		2023	
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	Anggaran (Rp)	Volume	Anggaran (Rp)
Kawasan Bawang Merah	Ha			5	205.000.000	10	400.000.000
Pekarangan Pangan Lestari	Kelompok			17	850.000.000		
Kawasan Alpukat	Ha			20	118.010.000		
Kawasan Durian	Ha					50	325.000.000
Sarana Pemasaran Hortikultura	Unit	1	24.290.000	1	84.900.000		
Sarana Pascapanen Hortikultura	Unit					1	101.050.000
Sarana Pengolahan Hortikultura	Unit					1	91.650.000
Prasarana Pascapanen Hortikultura	Unit					1	230.750.000
Prasarana Pengolahan Hortikultura	Unit	1	138.100.000				
TOTAL ANGGARAN (Miliar)			0,16		1,26		1,15

Pembangunan pertanian sebagai salah satu subsistem pembangunan nasional mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Hal tersebut karena pembangunan pertanian mempunyai dampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan kemauan masyarakat pertanian Indonesia untuk mengembangkan pertanian komersial, dalam lingkup agribisnis serta meningkatkan ketahanan pangan.

Hal ini dapat memicu percepatan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian khususnya hortikultura di Kabupaten Lubuk Linggau, salah satunya adalah budidaya tanaman cabai. Meskipun demikian, petani cabai kerap mengalami beberapa persoalan, seperti anjloknya harga cabai ketika panen sehingga, banyak petani yang kehilangan minat untuk berbudidaya cabai. Belum lagi ancaman OPT, serta ancaman gagal panen.

Untuk itu perlu ada dukungan dan terobosan yang dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Sehingga, tidak saja produksi cabai terjaga namun juga mengalami peningkatan baik mutu, kualitas dan hasil panennya. Terlebih lagi, komoditas Cabai Merah merupakan salah satu komoditas pertanian yang menyumbang angka inflasi.

Pada kunjungan kerja kali ini, Tim Komisi IV DPR RI ingin mengetahui sejauhmana pengembangan budi daya cabai di Kabupaten Lubuk Linggau,

serta untuk menggali informasi mengenai permasalahan dan hambatan dalam pengembangannya. Komisi IV DPR RI berharap, melalui kegiatan ini akan dapat membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga cabai, serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani di Provinsi Sumsel.

Aspirasi

- a. Perlu adanya subsidi terhadap petani hortikultura khususnya saat panen yang berdampak harga produk pertanian turun, dan pupuk langka
- b. Petani menginginkan adanya bantuan benih cabai, bawang merah untuk dibudidayakan secara masal, mengingat banyak produk pertanian yang gagal panen akibat el nino.
- c. Petani meminta fasilitasi studi banding ke Brebes dalam rangka menimba ilmu taman bawang merah mengintia hama yang ada sangat banyak sehingga perlu solusi
- d. CV Bonggol ingin mengetahui teknik atau cara penyimpanan produk hortikultura agar tidak cepat busuk dampak dari cuaca hujan
- e. Petani ingin dibantu sumur bor yang tepat dengan mata air, serta diperlukan adanya embung atau irigasi yang menggunakan pipa atau pralon agar kebutuhan air dapat terpenuhi.
- f. Penyuluh menyampaikan bahwa untuk biaya operasional agar dapat ditambah.
- g. Petugas OPT perlu ditambah beserta sarananya karena saat ini merangkap beberapa desa dan kecamatan sehingga terjadi keterlambatan dalam penanganan OPT akibatnya kurang optimal produksinya. Selain itu perlu adanya penambahan pegawai UPT di bidang pertanian untuk regenerasi pegawai di lapangan.

Tanggapan

- a. Mohon Pemda membantu penyerapan, atau memiliki sebuah kegiatan yang menyerap hasil-hasil hortikultura dari petani agar harga tidak jatuh dan harga produk pertanian dapat stabil.
- b. Petani saat ini bisa menebus pupuk dengan menyampaikan KTP kepada agen pupuk sehingga kebutuhan yang telah di rencanakan dalam RDKK dapat tertib.

- c. Petani dimohon segera mengajukan kebutuhan pupuk untuk komoditas cabai, padi dan sebagainya dalam rangkaantisipasi adanya el nino.
- d. Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi petani dan penyuluh dalam RDP ataupun Raker dengan Menteri Pertanian.

3. Broodstock Center Musirawas dalam Upaya Pengembangan Budi Daya Ikan di Kabupaten Musi Rawas

Komisi IV DPR RI memandang penting peran dari pembangunan balai perikanan budi daya Musirawas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat pembudidaya ikan, mengingat potensi budidaya masih terbuka lebar dan belum tergarap secara optimal. Terlebih jenis sumberdaya ikan endemik yang bernilai ekonomis masih banyak yang belum dibudidayakan. Misalnya ikan belida, ikan gabus dan lainnya, sehingga dilapangan kekurangan stok bahan baku. Hal ini menjadi tantangan kita untuk membudidayakan agar produksi ikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pengolah ikan.

Saat ini di lokasi BPBAT Sungai Gelam memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya keterbatasan jumlah kolam dan kondisi lingkungan budi daya yang tidak sepenuhnya sesuai untuk semua jenis ikan (pH air rendah), sehingga diperlukan upaya penambahan fasilitas budi daya terutama kolam ikan/tempat produksi induk ikan yang lebih luas. Proses penyediaan induk ikan unggul membutuhkan tempat budi daya, ketersediaan air yang cukup dan lingkungan yang baik.

Di sisi lain, mitigasi resiko melalui memperpendek jarak antara lokasi produksi induk unggul dengan sentra budi daya menjadi solusi agar proses distribusi induk menjadi lebih efektif dan efisien serta meningkatkan kelulushidupan induk.

Broodstock Center Musi Rawas yang telah berstatus milik KKP terletak di Desa Babat, Kec. Suku Tengah Lakitan, Kab. Musirawas, Sumatera Selatan, dengan luas lahan 40,9 Ha. Daerah ini memiliki sumber air yang berasal dari air jaringan irigasi Paduraksa yang tertata, air tanah dan disertai iklim yang mendukung untuk kegiatan budi daya ikan.

Pembangunan pusat produksi induk ikan air tawar/broodstock center dibutuhkan untuk mendukung program peningkatan produksi Perikanan Budi Daya:

- a. Percepatan produksi benih dan induk unggul di wilayah barat Sumatera Selatan, sebagian Propinsi Lampung dan Bengkulu;
- b. Mendorong kerjasama operasional lebih intensif dengan UPTD (BBIS dan BBI milik kab/kota) dan UPR;
- c. Menjaga mutu produksi induk unggul melalui penerapan SOP produksi induk unggul dan penyediaan fasilitas lingkungan budi daya yang optimal;
- d. Upaya mendekatkan UPT budi daya pada sentra-sentra produksi budi daya ikan di daerah.

Peran strategis *broodstock center* dalam pengembangan budi daya ikan :

- a. Pengamanan dan optimalisasi aset seluas 40,9 Hektar dengan nilai valuasi aset Rp 16 Milyar;
- b. Peningkatan kapasitas produksi ikan: induk ikan nila 100.000 ekor/tahun dan benih ikan nila 2 juta ekor/tahun dengan potensi nilai PNPB Rp 1,8 Milyar/tahun pada tahun 2024;
- c. Peningkatan produksi ikan nila di masyarakat sebanyak 1.000 Ton atau senilai Rp 22 Milyar;
- d. Penciptaan lapangan kerja bagi pembudidaya ikan sebanyak 400 orang dan 40 kelompok UPR
- e. Mendukung Kampung Perikanan Budi Daya di Propinsi Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung.

Dari 3 (tiga) komoditas utama budi daya air tawar, fokus produksi induk unggul yang dikembangkan di BC Musirawas adalah ikan Nila. Pemilihan ikan nila didasarkan pada:

- a. Produktifitas tinggi, mudah berkembang biak dan dibudidayakan;
 - b. Merupakan komoditas ikan konsumsi terbesar kedua setelah ikan lele;
 - c. Umur pakai induk pendek (max 2 tahun), harus selalu diremajakan;
 - d. Merupakan wujud tanggung jawab pemerintah untuk menjamin ketersediaan induk unggul.
4. Pada tahun 2021 nilai produksi ikan nila di Propinsi Bengkulu mencapai 88.468 ton menyusul Propinsi Sumsel 59.157 ton dan Propinsi Lampung 31.463 Ton. Hasil tersebut linier dengan data benih ikan Nila yang dihasilkan dari Unit

Pembenihan Rakyat tahun 2021 di tiga propinsi tersebut, yaitu di Propinsi Bengkulu 1.961.618 ekor, Propinsi Sumatera Selatan (sentra produksi di Kab. Musi Rawas) sebanyak 541.476 ekor dan Propinsi Lampung sebanyak 253.772 ekor. Artinya dari ketiga daerah tersebut berpotensi mensuplai benih ikan Nila di daerah sekitarnya.

Selain komoditas ikan Nila, ikan lain yang dapat dikembangkan di BC Musi Rawas adalah ikan Mas, dan Lele.

5. Sampai dengan tahun 2023 lahan yang sudah dibangun baru 25% dari luas lahan. Kebutuhan anggaran s.d tahun 2026, sebagai berikut:

s,d Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Anggaran 2 M Fisik: - Klaster Budi Daya Ikan Nila - Jaringan Listrik 100 KVA - Gudang Pakan - Rumah Genset Peralatan: - Root Blower - Pompa - Pengangkut pakan ikan)	Anggaran 5 M Fisik: - Asrama 3 Pintu - Rumah Jaga - Pemberokan Ikan - Kolam Budi Daya 800 m ² , 11 Unit - Land Clearing Lahan 10 Ha - Saluran Inlet dan Outlet - IPAL Peralatan: - Keramba Jaring Apung - Pompa Air - Alat Angkut Pakan Pemeliharaan: - Tandon Air 1 Ha - Kolam Budi Daya (600 m ² , 9 Unit)	Anggaran 2 M Fisik: - Hatchery Ikan - Kolam Budi Daya 600 m ² , 10 Unit - Jalan Produksi Peralatan: - Perlengkapan Produksi Pemeliharaan: - Saluran Inlet dan Outlet
Tahun 2025		Tahun 2026
Usulan Anggaran 10 M Fisik: - Jalan Lingkungan - Pembangunan Kolam - Pekerjaan Saluran - Kolam Endapan - Pagar Lingkungan		Usulan Anggaran 15 M Fisik: - Land Clearing - Jalan Lingkungan - Pembangunan Kolam - Pekerjaan Saluran - Pagar Lingkungan

<ul style="list-style-type: none"> - Bangsal Pemberokan - Rumah Operator - Laboratorium Kesehatan Ikan - Jaringan Listrik <p>Peralatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keramba Jaring Apung - Kincir Air 	<ul style="list-style-type: none"> - Bangsal Pemberokan - Hatchery Ikan Mas - Rumah Operator - Gudang Pakan - Kantor Administrasi <p>Peralatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keramba Jaring Apung - Kincir Air
--	---

Kebutuhan induk ikan di 3 (tiga) propinsi pada tahun 2021 : Nila 1.252.504 ekor, Mas 48.110 ekor, dan Lele 372.072 ekor. Kapasitas produksi maksimum induk ikan di *broodstock center* Musi Rawas s.d tahun 2026 sebanyak : Nila 400.000 ekor (memenuhi 31,9% kebutuhan induk), Mas 12.000 ekor (memenuhi 24,94% kebutuhan induk), dan Lele 24.000 ekor (memenuhi 6,45% kebutuhan induk).

Aspirasi

- a. Pembudiaya ikan meminta agar ada mesin pakan yang berkapasitas besar (pabrik pelet skala nasional) ada di Broodstock Center Musirawas, mengingat saat ini setiap panen merugi dampak biaya yang tinggi dan tidak mampu bersaing dengan produk ikan dari Lampung. Hal ini karena ikan dari Lampung produksi pelet lebih dekat dengan pabrik.
- b. Pembudiaya ikan meminta diperhatikan model pemasaran ikan provinsi sumatera selatan kedepannya agar dapat berdaya saing dan berkompetisi dengan provinsi lain.
- c. Perlu adanya bantuan excavator dan pengembangan kolam ikan kembali mengingat lahan yang tersedia sangat luas untuk dikembangkan dalam memenuhi pangan nasional bagian sumatera.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Komisi IV DPR RI mendorong PT Linggau Bisa menggagas kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal permodalan dan pendanaan, *sharing* pembiayaan dan bagi hasil dengan pihak investor, serta menjalin kerjasama dengan *stake holder* lainnya dalam hal promosi untuk pengembangan Taman Wisata Bukit Sulap;

2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan untuk terus mendukung dan meningkatkan kemitraan konservasi melalui pengembangan, pelatihan, pendampingan dan promosi hasil produk hasil UMKM masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi TNKS, sehingga dapat mendukung kegiatan ekowisata taman wisata bukit sulap dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan ekosistem TNKS tetap dapat terjaga dengan baik;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk berkordinasi dengan pemda dalam membantu penyerapan hasil-hasil hortikultura saat panen raya sehingga petani tidak dirugikan akibat harga anjlok di pasaran (harga produk pertanian dapat stabil).
4. Komisi IV DPR RI meminta c.q Kementerian Pertanian, Pupuk Holding dapat membantu petani dalam menebus pupuk dengan persyaratan yang mudah tanpa melanggar hukum, yakni dengan mengidentifikasi kebutuhan pupuk petani cukup dengan KTP sehingga kebutuhan petani yang telah direncanakan dalam RDKK dapat tersalurkan dan tertib sebelum datangnya el nino.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti aspirasi petani dan penyuluh diantaranya petugas OPT ditambah beserta sarannya karena saat ini tugasnya merangkap di beberapa desa dan kecamatan sehingga terjadi keterlambatan dalam penanganan OPT dan . perlu adanya penambahan pegawai UPT di bidang pertanian untuk regenerasi pegawai di lapangan yang tidak sedikit akan pensiun.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengalokasikan anggaran pembuatan pabrik pakan yang berkapasitas besar (pabrik pelet skala nasional) di Broodstock Center Musirawas agar produk ikan dari sumatera selatan dapat berdaya saing dan berkompetisi dengan provinsi lain.
7. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk diadakan bantuan excavator dan pengembangan kolam ikan di Broodstock Center Musirawas mengingat lahan yang tersedia sangat luas untuk dikembangkan dalam memenuhi pangan nasional bagian sumatera.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi serta rekomendasi dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama Mitra Kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Desember 2023

Ketua Tim,

ttd.

Budhy Setiawan
A-290

LAMPIRAN DOKUMENTASI



LAMPIRAN LIPUTAN MEDIA

- <https://lubuklinggaukota.go.id/public/detilberita/3616/Komisi%20IV%20DPR%20RI%20Apresiasi%20Pengembangan%20Sektor%20Pertanian%20di%20Kota%20Lubuklinggau>
- <https://indonesiakini.go.id/berita/9503110/komisi-iv-dpr-ri-apresiasi-pengembangan-sektor-pertanian-di-kota-lubuklinggau>
- <https://agungpost.pikiran-rakyat.com/berita/pr-3597444446/komisi-iv-dpr-ri-apresiasi-pengembangan-sektor-pertanian-di-kota-lubuklinggau>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48059/t/Riezky%20Aprilia%20Dorong%20Broodstock%20Musi%20Rawas%20Libatkan%20Masyarakat,%20Produksi%20Pakan%20Indukan>
- <https://pangannews.id/berita/1702342227/gegara-ini-program-broodstock-center-di-musi-rawas-banjir-kritikan-dpr-ri>